

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan dalam suatu entitas tidak hanya diperlukan dalam bisnis, melainkan juga dianggap penting dalam organisasi nirlaba khususnya rumah ibadah yang memiliki tanggung jawab mengelola dan jamaah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 menjelaskan bahwa laporan keuangan ialah suatu penyajian atas representasi kinerja keuangan suatu entitas yang dilakukan secara terstruktur (IAI, 2024). Menurut Kasmir (2019), laporan keuangan dapat diartikan sebagai alat komunikasi terkait posisi keuangan dan kinerja entitas sebagai output dari kegiatan atau proses akuntansi. Laporan keuangan ini selanjutnya berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan baik pengguna maupun bagi organisasi itu sendiri (Fauzi & Setyaningsih, 2020). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka laporan keuangan dapat diartikan sebagai penyajian secara terstruktur atas informasi keuangan entitas dari proses akuntansi dalam periode tertentu, yang kemudian hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan menilai kinerja organisasi, baik berorientasi pada laba ataupun non laba.

Organisasi non laba atau yang juga sering disebut organisasi nirlaba dapat diartikan sebagai suatu lembaga dengan tujuan utama yang difokuskan pada manfaat sosial dan pelayanan publik, bukan untuk keuntungan ekonomi (Marlinah & Ibrahim, 2018). Secara umum, organisasi nirlaba memperoleh dana dari dukungan pembiayaan yang bersumber dari kontribusi, dana abadi, donasi masyarakat, serta bantuan pemerintah. Organisasi nirlaba yang menjalankan

program-programnya dengan menggunakan sumber daya dari masyarakat wajib menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada publik (Lasfita & Muslimin, 2020). Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba ada baiknya lebih menekankan pada bentuk pengelolaan dana agar sesuai dengan misi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi bergantung pada laporan keuangan yang tidak hanya mampu menilai kondisi keuangan, tetapi juga memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian informasi. Implementasi atas transparansi harus disertai kejujuran dan keterbukaan karena pemilik kepentingan berhak mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan (Karimah & Baehaqi, 2022). Hal ini mendukung pernyataan Solin (2023) yang berpendapat bahwa organisasi nirlaba perlu untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan dana sebagai pertanggungjawaban kepada donatur maupun pemilik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi organisasi nirlaba, laporan keuangan bisa menjadi sarana pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, khususnya jamaah selaku donatur dalam rumah ibadah seperti masjid.

Masjid merupakan salah satu dari bentuk rumah ibadah dapat diartikan sebagai suatu tempat ibadah sekaligus pengajaran mengenai tablig islamiah untuk jamaah muslim (Hardianto et al., 2021). Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat melalui aspek sosial, budaya, maupun ekonomi (Istan, 2022). Laporan keuangan berperan penting dalam pengembangan masjid yang lebih baik dengan dipublikasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan dan ketenangan terhadap penggunaan dana

(Nurillah et al., 2020). Dana yang diterima dari sumbangan jamaah, zakat, infak, maupun sumber lainnya harus dikelola dengan baik agar tujuan awal pemberian dana tersebut bisa terstruktur dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Kurniangsish, 2022). Namun, pada praktiknya masih banyak rumah ibadah seperti masjid yang masih belum melakukan penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Hal ini akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat akibat dinilai rendahnya kualitas laporan keuangan.

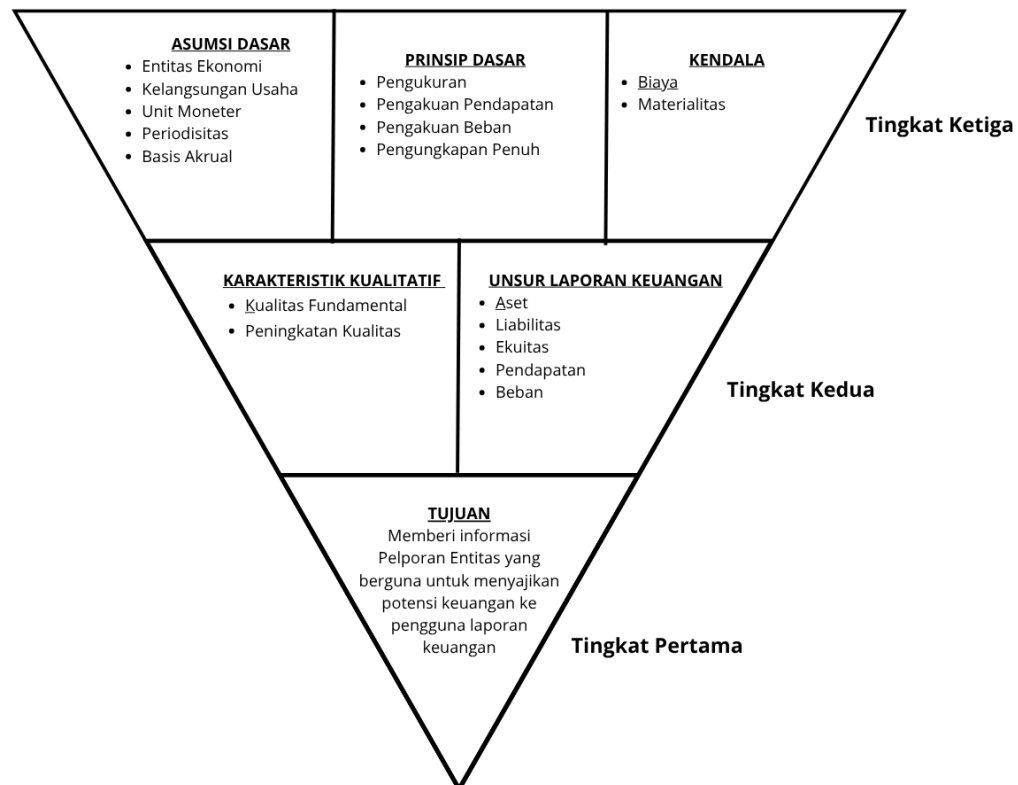
Menurut Nurillah (2020) tingkat pemenuhan standar yang memastikan laporan tersebut relevan dan bermanfaat bagi para pembacanya. Pendapat tersebut sejalan dengan informasi bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan hasil akhir akuntansi yang informatif dan mudah dipahami pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Pemikiran tersebut menegaskan bahwa kualitas informasi keuangan menjadi aspek krusial dalam pelaporan. Dalam konteks teori akuntansi, kualitas informasi ini telah dirumuskan secara sistematis oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *Financial Accounting Standards Board* (FASB) dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan.

Kerangka konseptual pelaporan keuangan yang bisa juga disebut *framework* merupakan suatu konsep yang koheren dan sistematis, dengan tujuan utama menghasilkan laporan keuangan (Kieso et al., 2017). Dengan adanya kerangka konseptual pelaporan keuangan dapat memberikan landasan teoritis mengenai informasi keuangan yang berkualitas. Kerangka konseptual ini lebih lanjut dijelaskan dalam dokumen yang bertajuk "*Statement of Financial Accounting Concepts*". Aspek dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan ini meliputi tiga

tingkatan yakni tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif dan unsur laporan keuangan, serta identifikasi pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. (Kieso et al., 2017).

Gambar 1. 1. Tingkatan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

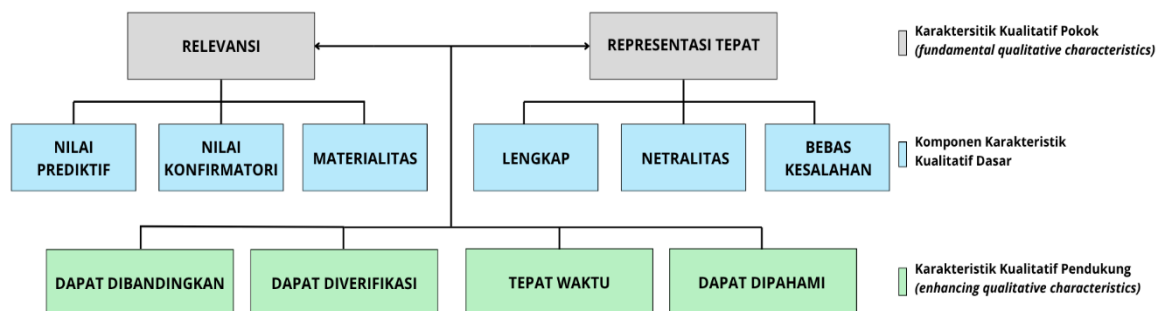
Sumber: Intermediate Accounting ((Kieso et al., 2017)



Tingkatan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan ini dibuat karena kompleksnya informasi akuntansi yang dimana setiap pedoman memiliki kedudukan dan peran memiliki perbedaan (Kustono, 2015). Tingkatan pertama menjadi fondasi utama yang menetapkan tujuan dasar pelaporan keuangan. Selanjutnya, tingkatan kedua menjadi jembatan antara tujuan pelaporan dan bagaimana praktik penyusunan laporan. Sementara tingkatan ketiga menjadi pedoman dalam praktik pelaporan keuangan (Kieso et al., 2017). Struktur bertingkat ini untuk menunjukkan hubungan tujuan pelaporan dan kriteria kualitas

informasi yang kemudian digunakan dalam penyelesaian laporan keuangan yang bermanfaat (Putri, 2019). Untuk memastikan informasi dalam laporan keuangan benar-benar bermanfaat, kerangka konseptual menggarisbawahi perlunya karakteristik kualitatif.

Karakteristik kualitatif dalam kerangka konseptual ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas sebuah laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan memberikan pedoman yang jelas dalam proses penyusunan, agar informasi yang disajikan tidak sekadar akurat secara teknis, melainkan juga dapat dipahami dengan baik oleh pengguna. (IAI, 2017). Dengan diterapkannya karakteristik kualitatif, pengguna laporan keuangan dapat melakukan penafsiran yang benar, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran. Ini agar nantinya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola keuangan entitas. Dalam kerangka konseptual, karakteristik kualitatif ini terbagi menjadi dua yakni karakteristik kualitatif pokok (*fundamental qualitative characteristics*) yang terdiri dari relevansi dan representasi tepat serta karakteristik kualitatif pendukung (*enhancing qualitative characteristics*) yang terdiri dari dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dapat dipahami (Kieso et al., 2017). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2, keenam karakteristik ini memiliki peran penting dalam menjamin bahwa informasi akuntansi yang disajikan benar-benar merepresentasikan kondisi entitas yang sebenarnya.



Gambar 1. 2. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Sumber: Intermediate Accounting ((Kieso et al., 2017)

Karakteristik pertama, laporan keuangan memerlukan karakteristik yang relevansi (*relevant*) sebagai karakteristik kualitatif pokok. Menurut Najmudin dan Bayinah (2022), relevansi disini menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat memberikan penegasan yang akurat dan terpercaya atas transaksi yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan akan dinilai relevan ketika informasi yang disajikan berguna bagi para pengguna, termasuk pemberi dana (Sulistiyo et al., 2018). Hal ini selaras dengan pandangan Kieso (2017) yang mengungkapkan bahwa relevansi mengacu pada kualitas informasi akuntansi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam bukunya, Kieso juga menjelaskan bahwa informasi keuangan dapat dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediktif (*predictive value*), nilai konfirmasi (*confirmatory value*), dan materialitas (*materiality*). Kualitas informasi laporan keuangan menjadi krusial, sebab penyajiannya dirancang agar pengguna dapat memahami data yang tersedia dengan lebih mudah dan tepat waktu. Informasi yang disusun dengan baik, jelas, dan terstruktur akan meningkatkan pemahaman pengguna, sehingga mereka dapat mengambil keputusan ekonomi secara lebih tepat dan efisien.

Karakteristik kedua, laporan keuangan juga memerlukan karakteristik representasi tepat (*faithful representation*) sebagai karakteristik kualitatif pokok. Representasi tepat berarti bahwa penjelasan dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan apa yang terjadi (Kieso et al., 2017). Kieso menjelaskan bahwa representasi tepat harus memuat informasi lengkap (*completeness*), netralitas (*neutrality*), bebas kesalahan (*free from error*). Informasi keuangan yang memiliki representasi tepat apabila terbebas dari kesalahan material, tidak menimbulkan pemahaman yang menyesatkan, dan dapat dipercaya oleh pengguna (Puriyanti & Mukhibad, 2020). Karakteristik ini menjadi krusial karena representasi tepat dalam penyajian, laporan keuangan dapat kehilangan nilai informatifnya. Informasi yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya akan menyesatkan pengguna dan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik ketiga, laporan keuangan memerlukan karakteristik dapat dibandingkan (*comparable*) sebagai peningkatan kualitas. Dapat dibandingkan memungkinkan pengguna melakukan perbandingan antar periode maupun antar entitas untuk mengevaluasi tren posisi, kinerja, dan perubahan keuangan. (Afriansyah & Paddery, 2022). Informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lain. (Romney & Steinbart, 2016). Tanpa adanya keterbandingan, pengguna akan kesulitan dalam menilai apakah perubahan dalam angka-angka keuangan disebabkan oleh perbedaan kinerja atau karena perbedaan metode pencatatan.

Karakteristik keempat, laporan keuangan memerlukan karakteristik dapat diverifikasi (*verifiability*) sebagai peningkatan kualitas. Dapat diverifikasi berarti informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak independen. Ini baik melalui observasi langsung maupun metode pengukuran yang sama, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keandalan informasi yang disajikan (Kieso et al., 2017). Hal ini mendukung argumen Ridzal (2022) yang menyatakan bahwa karakteristik dapat diverifikasi menunjukkan informasi yang disajikan dapat diperiksa kebenarannya, dan apabila diuji oleh beberapa pihak independen, hasilnya pada umumnya konsisten serta tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan. Dengan adanya karakteristik dapat diverifikasi ini tentu dapat membantu pengguna dalam mempresentasikan fenomena ekonomi yang terjadi dalam entitas.

Karakteristik kelima, laporan keuangan memerlukan karakteristik ketepatan waktu (*time line*) sebagai peningkatan kualitas. Tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan memastikan informasi tetap akurat dan terkini, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang bernilai. (Pratiwi & Lestary, 2020). Semakin cepat laporan keuangan tahunan disajikan, maka akan semakin mendukung efektivitas dalam proses pengambilan keputusan (Ridzal et al., 2022). Tepat waktu disini berarti informasi yang disajikan ada pada momen yang sesuai dan dalam kondisi terkini (*up to date*) agar dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif (Romney & Steinbart, 2016). Ketepatan waktu penyajian informasi menjadi salah satu karakteristik utama guna memastikan relevansi pengambilan keputusan atas laporan keuangan yang disajikan.

Karakteristik keenam, laporan keuangan juga memerlukan karakteristik yang dapat dipahami (*understandable*) sebagai peningkatan kualitas. Kualitas informasi yang penting dapat dilihat dari tingkat keterpahaman bagi pengguna. Pengguna di sini diasumsikan memiliki pengetahuan memadai mengenai aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi yang disajikan (Afriansyah & Paddery, 2022). Kualitas informasi dalam laporan keuangan tidak hanya bergantung pada isi yang relevan dan andal, tetapi juga pada kemudahan informasi tersebut untuk dipahami oleh pengguna. Karakteristik dapat dipahami menunjukkan bahwa informasi yang tercantum dalam laporan keuangan wajib disajikan dengan istilah dan format yang selaras dengan tingkat pemahaman pengguna, sehingga mudah dimengerti (Romney & Steinbart, 2016). Penyajian yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperluas aksesibilitas informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Selain keenam karakteristik sesuai dengan karakteristik kualitatif kerangka konseptual, masih terdapat satu karakteristik yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2016), yakni aksesibilitas (*accessible*). Aksesibilitas berarti publik memiliki kemudahan untuk membaca laporan keuangan organisasi dengan mekanisme tertentu guna mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk terhadap organisasi (Sabili et al., 2023). Kemudahan akses laporan keuangan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pencatatan keuangan digital dan publikasi laporan keuangan. Hal ini ditujukan agar publik bisa menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang dilakukan dalam organisasi.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif akan menunjukkan pemenuhan tingkat kualitas laporan keuangan itu sendiri (Maulana & Lubis, 2020). Apabila karakteristik kualitatif ini tidak dilakukan oleh masjid, kemungkinan besar laporan keuangan tidak bisa dianggap relevan, dapat dipercaya, dan informatif (Andarsari, 2017). Kerangka konseptual pada awalnya ditujukan bagi organisasi bisnis, tetapi prinsipnya dapat diterapkan juga pada organisasi nirlaba, termasuk masjid. Di Indonesia, penerapan kerangka ini diperkuat dengan adanya ISAK 335 yang mengatur laporan keuangan entitas nirlaba dan mengadopsi konsep dari kerangka konseptual. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap standar akuntansi yang berlaku pada organisasi nirlaba merujuk pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengatur terkait pedoman penyusunan laporan keuangan untuk entitas nirlaba, tidak terkecuali masjid (Mursidah et al., 2023). ISAK 335 menegaskan bahwa laporan keuangan masjid disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai berbagai aktivitas yang dijalankan masjid. (Andriani et al., 2022). Adapun komponen yang disajikan dalam laporan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 335 yakni Laporan Posisi Keuangan, Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Mursidah et al., 2023). Dengan diterapkannya ISAK 33, diharapkan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan masjid sehingga informasi yang disajikan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.

Penyalahgunaan dana yang terjadi di masjid, sudah sering sekali dilakukan akibat kurangnya pengawasan. Pengawasan ini menjadi penting, mengingat masih banyak terjadinya kekeliruan, kegagalan, serta petunjuk yang tidak efektif yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan (Pradesyah et al., 2021). Hal itulah yang membuat masjid seharusnya memiliki sistem pengawasan untuk memastikan dana yang diberikan oleh donatur dan jamaah dapat dipergunakan dengan semestinya. Hal tersebut untuk menghindari adanya tindakan korupsi dana yang mana sudah sering kali diberitakan di media massa nasional seperti Kompas, Tribun, Jawa Pos, Siwalima, Detikcom, dan media lainnya.

Tindakan korupsi dana masjid yang baru-baru ini ada, terjadi di Maluku Tenggara. Dilansir dari portal berita online Radio Republik Indonesia (RRI), penggelapan dana ini dilakukan dalam rangka pembangunan Masjid Nurul Janna Ohoi Nerong (Matinahoruw, 2025). Terduga berinisial MFB merupakan mantan bendahara panitia pembangunan masjid dan telah ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: B01/Q.1.19/Fd.2/02/2025 tanggal 25 Februari 2025. Kasus ini terjadi diawali ketika Pemerintah Daerah Maluku Tenggara menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Masjid Nurul Jannah Ohoi Nerong pada tahun 2022 sebesar 1 Miliar Rupiah (Rp1.000.000.000). Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, menyatakan bahwa penggelapan dana dilakukan dengan membelanjakan bahan material tanpa dilengkapi bukti yang sah. Selain itu, tersangka juga tidak menyelesaikan dokumen laporan pertanggungjawaban dengan baik. Kerugian negara yang timbul akibat kasus ini sebesar Rp515.731.800 setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Malra.

Kasus korupsi dalam Masjid juga pernah dilakukan oleh mantan ketua takmir Masjid Al-Islah Surabaya. Salah satu jamaah melaporkan mantan ketua takmir inisial WA atas dugaan penggelapan dana pembangunan masjid Al-Islah dengan laporan resmi nomor TPL/B/174/I/2022/SPKT/Polrestabes Surabaya (Ramadan, 2022). Keresahan adanya penggelapan dana diawali pada tahun 2018 karena belum rampungnya pembangunan, padahal dana yang terkumpul sekitar Rp16-18 Miliar dari RAB dan donasi masyarakat sekitar. Sebelum dilaporkan, jamaah sebelumnya sempat melakukan mediasi dengan pihak Kelurahan Gading yang diwakili ketua LPMK, Bapak Camat, dan Kapolsek serta Danramil Tambaksari untuk meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), karena selama pembangunan panitia pembangunan tidak pernah mengumumkan pengelolaan dana atas pembangunan masjid tersebut. Hingga di November 2021, pemerintah menyarankan untuk melakukan audit independen karena pihak panitia pembangunan mengabaikan tuntutan jamaah. Hasil audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian dana yang dilaporkan sebanyak lebih dari Rp2,8 Miliar.

Kasus lainnya juga pernah terjadi di Masjid Raya Sumatra Barat pada tahun 2020 oleh bendahara keuangan Masjid Raya Sumbar sekaligus aparatur sipil negara (ASN) berinisial YRN (Purba, 2021). Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar, Mardi, mengatakan bahwa kemungkinan uang yang diambil oleh YRN dari uang infak dan sedekah jamaah sebesar Rp 857,7 juta. Tidak hanya itu, YRN juga terbukti melakukan penyelewengan dana zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebesar Rp375 juta, dan penarikan uang sisa dana Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) sebesar Rp98,2 juta. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia

(Wasekjen MUI), Amirsyah Tambunan, menyayangkan hal tersebut dan berharap kasus dugaan penyelewengan dana masjid itu bisa dijadikan pelajaran bagaimana seharusnya dana jamaah dikelola dengan baik secara transparan dan akuntabel sehingga dana jamaah bisa dipertanggung jawabkan. YRN sendiri mengaku bahwa motivasinya melakukan penggelapan dana adalah untuk foya-foya dan keperluan pribadi.

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa masjid juga memerlukan penyampaian laporan keuangan dan realisasi anggaran yang berkualitas, yaitu transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Nurillah (2020), apabila laporan keuangan tidak dilakukan secara transparan dan baik, itu dapat memungkinkan terjadinya risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana serta merusak reputasi pihak yang bersangkutan. Dalam keuangan, perilaku jujur, taat aturan, transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan merupakan salah satu wujud bela negara (Ashari & Boediono, 2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid tidak hanya berfungsi menjaga kepercayaan jamaah, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bagian dari pengamalan nilai bela negara dalam aspek non-militer, yaitu menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, diperlukan penyajian laporan keuangan yang berkualitas guna menunjukkan kesungguhan masjid dalam melakukan implementasi bela negara dalam membangun persatuan dan ketahanan sosial jamaah juga bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan ini memegang peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan seluruh masjid di kawasan Kota Surabaya. Alasan yang mendasarinya adalah karena kota ini merupakan salah satu kota besar dengan jumlah masjid yang cukup banyak dan aktivitas keagamaannya sangat aktif. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, agar setiap dana yang dihimpun dari jamaah maupun sumber lainnya dapat dikelola secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Dengan jumlah masjid yang banyak dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, potensi pengumpulan serta penggunaan dana umat menjadi signifikan, sehingga keberadaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik (Shonhadji et al., 2024). Laporan keuangan yang baik juga berfungsi sebagai sarana pengawasan sosial, karena jamaah sebagai pemberi dana dapat menilai sejauh mana pengurus masjid telah mengelola amanah dana secara bertanggung jawab.

Data dari Kota Surabaya Dalam Angka 2025 menunjukkan bahwa terdapat banyak masjid dan mushola yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah tersebut tidak hanya menggambarkan tingginya aktivitas keagamaan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keragaman sosial dan budaya di Kota Surabaya. Informasi ini penting untuk dipahami karena masjid memiliki peran sentral dalam kehidupan umat, tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai wadah kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi masjid di Surabaya, rincian jumlahnya per kecamatan pada tahun 2024 akan tersaji dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1. Jumlah Masjid dan Mushola di Surabaya

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola
1	Karangpilang	72	52
2	Jambangan	29	62
3	Gayungan	42	45
4	Wonocolo	75	85
5	Tenggilis	22	73
6	Gunung Anyar	34	59
7	Rungkut	55	106
8	Sukolilo	76	66
9	Mulyorejo	41	21
10	Gubeng	101	21
11	Wonokromo	90	85
12	Dukuh Pakis	55	21
13	Wiyung	37	44
14	Lakarsantri	43	51
15	Sambikerep	48	82
16	Tandes	68	50
17	Sukomanunggal	56	53
18	Sawahan	106	27
19	Tegalsari	55	61
20	Genteng	48	64
21	Tambaksari	83	106
22	Kenjeran	81	131
23	Bulak Banteng	30	61
24	Simokerto	33	72
25	Semampir	58	58
26	Pabean Cantian	58	74
27	Bubutan	65	59
28	Krembangan	67	95
29	Asemrowo	41	55
30	Benowo	39	77
31	Pakal	53	37
Total		1.761	1.953

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka 2025 (2024)
 (Diakses web-api.bps.go.id, 18 Februari 25)

Data tersebut menunjukkan bahwa Surabaya sebagai kota metropolitan di Indonesia, memiliki tingkat persebaran tempat ibadah untuk jamaah muslim yang tergolong tinggi. Wilayah dengan jumlah masjid atau mushola lebih banyak cenderung memiliki populasi yang padat. Kondisi ini menuntut setiap masjid dan mushola untuk dapat dikelola secara profesional, termasuk dalam aspek keuangan, guna menjaga kepercayaan jamaah (Syauqi, 2018). Dengan banyaknya masjid di 31 kecamatan Surabaya yang dikelola berbagai pihak, pengelolaan dana yang tepat dan terpercaya bergantung pada kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional masjid, tetapi juga memperkuat kepercayaan jamaah dan masyarakat di Kota Surabaya terhadap pengelolaan dana masjid itu sendiri (Shonhadji et al., 2024). Jamaah membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditujukan agar masjid dapat memberikan Informasi keuangan yang dibutuhkan jamaah untuk meningkatkan kredibilitas pengelolaan masjid dan kepercayaan jamaah.

Jamaah dalam KBBI diartikan sebagai para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama. Al Jamaah dalam bahasa Arab diartikan sebagai berkumpulnya kaum muslimin. Berkumpul disini diartikan atau dianggap memiliki kesamaan tujuan dan spiritual yang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, menunjukkan bahwa penyebaran penduduk beragama Islam (jamaah muslim) memiliki jumlah yang cukup besar di tahun 2024. Informasi mengenai rincian jumlah penduduk tersebut tersaji dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Surabaya

Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
Islam	2.598.020 jiwa	86,05%
Kristen Protestan	257.620 jiwa	8,55%
Kristen Katolik	115.627 jiwa	3,84%
Hindu	6.459 jiwa	0,21%
Budha	39.341 jiwa	1,31%
Lainnya	955 jiwa	0,04%
Total	3.018.022 jiwa	100%

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka 2025 (2024)
 (Diakses web-api.bps.go.id, 15 Mei 25)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebanyak 2,5 juta penduduk Surabaya dengan persentase 86% beragama Islam. Persentase tersebut menunjukkan bahwa penduduk Surabaya mayoritas beragama Islam. Dengan menjadi agama mayoritas, diharapkan jamaah dapat memberikan dampak pada rumah ibadahnya, yakni masjid melalui pemberian dana baik berupa donasi maupun pemberian lainnya. Bentuk dukungan finansial yang telah diberikan jamaah tentu harus dilakukan secara tanggung jawab agar dapat bermanfaat sehingga dapat dipercaya oleh jamaah selaku pemberi dana dan laporan keuangan yang disajikan dapat berkualitas. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang dibutuhkan jamaah sebagai bentuk penguatan kepercayaan sekaligus pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terkait kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan jamaah di masjid diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan determinan kualitas laporan keuangan pada rumah ibadah, khususnya masjid, yang hingga kini masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi jamaah

muslim. Sehingga penelitian dengan diberi judul **Identifikasi Faktor-Faktor Kualitas Laporan Keuangan Masjid Di Surabaya: Pendekatan Exploratory Factor Analysis (EFA)** sebagai upaya dalam memahami faktor-faktor kualitas laporan keuangan pada masjid sesuai dengan kebutuhan jamaah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah berikut:

1. Apa saja informasi laporan keuangan masjid yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh jamaah muslim di Surabaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang membentuk kualitas penyajian laporan keuangan masjid di Surabaya berdasarkan analisa faktor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi informasi laporan keuangan masjid yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh jamaah muslim di Surabaya.
2. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang membentuk kualitas penyajian laporan keuangan masjid melalui pendekatan *Exploratory Factor Analysis* (EFA).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4. 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang akuntansi dalam lingkup organisasi keagamaan khususnya masjid yang merupakan salah satu bentuk rumah ibadah. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat menambah wawasan mengenai determinasi kualitas laporan keuangan dalam lingkup masjid.

1.4. 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi studi lanjutan yang membahas praktik keuangan di rumah ibadah khususnya masjid. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, serta memberikan masukan bagi pengembangan regulasi atau pedoman akuntansi yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai kualitas penyajian laporan keuangan di masjid.